

Forum Freedom

Tema : Kebebasan dalam Perspektif Perempuan

Narasumber : Neng Dara Afiah (NDA)

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Neng Dara Afiah. Selamat pagi Neng. Dia adalah anggota Komnas HAM Perempuan, dan salah satu pemimpin redaksi majalah Dialog, serta pengurus pusat Fatayat NU. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Kebebasan dalam Perspektif Perempuan. Tema yang jarang kita bahas.

Latar belakangnya adalah bahwa salah satu aspek penting demokrasi liberal adalah pengakuan hak-hak minoritas dan kesetaraan kaum perempuan. Di Indonesia, dalam ranah budaya, agama, dan politik, masalah perempuan masih menjadi masalah serius.

Perjuangan perempuan biasanya dilakukan dengan membentuk organisasi-organisasi independen yang secara khusus memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun tetap saja ada jarak antara keinginan yang hendak dicapai dan apa yang terjadi.

Nah, menurut anda persoalan apa yang paling mendasar bagi perempuan di Indonesia sekarang ini.

NDA:

Ya. Tema utama kaum perempuan sampai saat ini masih yang paling dasar, yakni kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini bisa kekerasan struktural, bisa kekerasan kultural.

Kekerasan struktural biasanya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan negara, yang kurang menyuarkan kaum perempuan.

HB:

Misalnya apa. Ada contoh konkret nggak.

NDA:

Banyak sekali kebijakan yang kurang mengakomodasi perempuan. Misalnya, dalam UU kesehatan. Aborsi bagi perempuan itu masih dianggap sebagai tindakan kriminal. Ibu-ibu di desa itu melakukan aborsi bukan karena dia hamil duluan, tapi karena dia tidak menghendaki anak. Karena dia anaknya sudah banyak, dan dia miskin. Itu salah satu contoh. Artinya, perempuan tidak boleh memilih dirinya untuk hamil atau tidak hamil. Ini salah satu contoh bagaimana kebijakan di tingkat pemerintah itu belum mengakomodasi suara perempuan.

Di wilayah kultural, kekerasan perempuan itu paling ruwet adalah di wilayah budaya dan agama. Ketika perempuan ingin memilih dalam hidupnya, selalu benturannya adalah budaya dan agama. Menurut budaya dan agama kita, perempuan itu harus begini. Dan seterusnya. Yang terlihat di masyarakat itu seperti itu.

HB:

Apakah itu berarti alasan berdasarkan agama atau budaya itu tidak valid untuk dikemukakan.

NDA:

Sangat, sangat tidak valid. Budaya itu kan konstruksi sosial, sebagaimana agama adalah reinterpretasi terus-menerus.

Jadi sebagai sebuah konstruksi dan reinterpretasi, hal itu bisa diubah. Kita bisa melakukan berbagai perubahan. Budaya itu kan berproses. Agama kan juga bisa kita reinterpretasi terus menerus. Yang penting kita jangan melanggar prinsip-prinsip dasar agama apa pun, atau budaya apa pun. Inti dari agama itu kan kebebasan bagi manusia, memerdekakan manusia.

Kalau agama dan budaya tidak memberikan pijakan ini, maka kita harus terus menerus melakukan perbaikan.

HB:

Jadi bagi anda itu tidak soal, ya.

NDA:

Sangat, sangat tidak soal.

HB:

Kalau ada ketentuan budaya yang merugikan, harus diganti dengan budaya yang lebih sesuai.

NDA:

Ya. Harus diganti. Kita harus berani bermimpi untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang jauh lebih memerdekakan manusia. Baik itu perempuan maupun laki-laki.

Kalau dua hal ini, agama dan budaya, belum mengarah ke situ, maka keduanya harus selalu ditinjau ulang. Dan harus terus dilakukan perbaikan.

HB:

Tapi kekhawatiran orang dengan metode anda itu, orang khawatir tidak ada pegangan nilai yang konstan. Tidak ada yang tetap. Kalau direinterpretasi terus-menerus, yang dijadikan pegangan tidak ada. Itu kecurigaan orang-orang.

NDA:

Itu saya kira kecurigaan yang tidak berdasar. Pegangan nilai yang konstan itu adalah bahwa kita harus selalu memberikan kemerdekaan bagi manusia, siapa pun itu. konvensi internasional itu sudah menjamin hal itu. konvensi nasional sudah menjamin hal itu. Kita tidak ingin itu hanya pada tataran omongan. Itu harus terimplementasi dalam tindakan sehari-hari.

Jadi orientasi kita adalah pada memerdekakan manusia, laki-laki dan perempuan. Pada keadilan, dan pada kesetaraan. Itu orientasi nilai kita. Itu yang seharusnya dijadikan prinsip dasar.

Kalau dalam praksisnya belum ke arah itu, saya kira ini harus terus kita perbaiki. Ini kan proses.

HB:

Nah, anda menyebut kata kunci yang menarik sekali, yaitu kesetaraan. Ini tuntutan perempuan terhadap kaum laki-laki. Maksudnya apa itu.

NDA:

Kesetaraan itu maksudnya memberikan nilai kemanusiaan yang sama. Misalnya saya, Neng Dara, dan mas hamid, itu saya tidak lebih rendah nilai kemanusiaannya dibanding Hamid yang laki-laki. Jadi nilai kemanusiaan yang sama.

Selama ini perempuan kan dianggap separuh manusia. Pandangan seperti itu masih sangat kuat. Dan karena itu pengaturan terhadap perempuan itu masih sangat kuat.

HB:

Dengan kata lain anda ingin mengatakan bahwa hendaknya manusia itu pertama-tama harus dilihat sebagai manusia. Baru kemudian dilihat jenis kelaminnya.

NDA:

Ya, itu yang harus menjadi dasar.

HB:

Selama ini yang anda rasakan adalah yang didahulukan jenis kelamin, baru manusianya.

NDA:

Ya, seperti itu. Pada berbagai konvensi ya seperti itu.

HB:

Kalau hubungan antara tuntutan kebebasan dengan dunia perempuan itu sendiri bagaimana anda melihatnya.

NDA:

Kebebasan yang kami maksud adalah kebebasan perempuan untuk memilih. Selama ini kebebasan untuk memilih bagi kaum perempuan itu kan tidak terlalu kuat. Misalnya, di pedesaan itu perempuan untuk memilih pasangannya pun agaknya tidak sanggup. Biasanya orang tua atau keluarga yang intervensi. Ini yang cocok buat kamu.

Termasuk sekolah. Yang cocok buat perempuan itu SMA jurusan masak, misalnya. Untuk profesi yang cocok buat kaum perempuan adalah guru. Pakem-pakem seperti itu sudah dikonstruksi sedemikian rupa oleh budaya. Sehingga kalau perempuan

itu mencalonkan diri menjadi bupati atau gubernur, itu ganjalannya tidak mudah. Bahkan kadang kalangan terdidik pun ikut mengganjal itu.

HB:

Apa yang anda kemukakan ini juga saya dengar banyak dikemukakan oleh berbagai lembaga feminis, dan tokoh-tokoh feminis.

Tapi di antara mereka itu berbeda-beda. Ada feminis ekstrem, ada yang Marxis, ada yang liberal, moderat dan lain-lain. Apa bedanya semua ini.

NDA:

Bedanya begini. Kalau feminis radikal itu mendasarkan perjuangannya pada seksualitas.

HB:

Maksudnya apa.

NDA:

Maksudnya begini. Akar penindasan terhadap perempuan adalah penindasan di level seksual. Si laki-laki lebih kuat secara seksual, sementara perempuan di bawah. Ini terkonstruksi dalam rumah tangga. Laki-laki itu kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga. Ini kemudian ada hierarki. Suami di atas, perempuan di bawah. Menurut kaum feminis radikal, ini adalah akar penindasan terhadap perempuan.

Karena itu, implikasinya, kaum feminis radikal lebih banyak yang memilih menjadi lesbian. Ini sebenarnya gerakan untuk membongkar ketidaksetaraan seksual.

HB:

Itu yang radikal ya. Ok. Kita akan beristirahat sebentar. Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar.

HB:

Selamat pagi lagi, saudara-saudara. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Neng Dara Afiah. Dia adalah anggota Komnas HAM Perempuan. Ketua redaksi jurnal Dialog, Depag, dan pengurus pusat Fatayat NU.

Tadi saya bertanya kepada dia tentang berbagai jenis kelompok feminis. Dan tadi dia baru menjelaskan tentang feminis radikal, yang menganggap bahwa akar semua masalah ketidaksetaraan adalah faktor seksual.

Nah, sekarang kalau yang liberal dan yang moderat bagaimana.

NDA:

Kalangan feminis liberal menganggap bahwa akar masalahnya adalah pada aspek biologisnya. Karena aspek biologisnya berbeda dari laki-laki, maka dia menjadi sumber penindasan.

Feminis liberal ingin membongkar ini. Faktor biologis ini menurut mereka juga konstruksi sosial. Bukan alamiah. Karena itu strategi perjuangannya adalah bagaimana perempuan itu bisa bersaing dengan laki-laki dalam semua bidang.

Strategi lain bagi kaum liberal adalah bagaimana menjadikan kebijakan-kebijakan yang ada memberikan tindakan afirmatif bagi perempuan. Misalnya adalah 30 kuota di DPR. Ini buah perjuangan kaum liberal feminis.

HB:

Agak bertentangan ya, kontradiktif.

NDA:

Ya, agak bertentangan. Di satu sisi ada kata persaingan sebagai kata kunci. Dan asumsinya kita setara. Di sisi lain ada tindakan afirmatif yang merupakan bagian dari strategi feminis liberal.

Saya ingin menekankan tentang feminis radikal. Feminis radikal itu menganggap bahwa akar penindasan perempuan itu dalam rumah tangga. Ada hierarki antara suami dan istri.

HB:

Itu kemudian yang meluas ke masyarakat, ya.

NDA:

Ya. Itu yang kemudian meluas ke masyarakat. Makanya feminis radikal memunculkan isu perempuan sebagai kepala rumah tangga.

HB:

Sekarang yang paling banyak. Setahu saya yang paling banyak adalah yang moderat.

NDA:

Sebenarnya yang radikal dan liberal juga punya cukup banyak pengikut. Kalau saya sendiri memilih yang moderat. Moderat dalam pengertian yang berkonteks dan realistis. Misalnya soal affirmative actions kaum liberal itu kami dukung, tapi kalau kaum bawah harus bersaing dengan kaum atas itu kami agak meragukan. Sementara kaum feminis radikal sepengetahuan saya mengatakan bahwa kita bersaing saja. Jadi perempuan dalam perspektif liberal harus menjadi super woman.

HB:

Berdasarkan pengalaman anda selama belasan tahu, dan anda menempatkan diri sebagai feminis moderat, anda tentu bersentuhan dengan kaum feminis dari berbagai aliran di Indonesia, bagaimana itu dikaitkan dengan sejarah feminisme di Indonesia.

NDA:

Kebetulan saya bisa berteman baik dengan kalangan yang beragam. Hubungannya dengan sejarah feminis Indonesia, satu sama lain memang kadang bertabrakan. Tapi kadang ada isu baru yang membuat mereka bersatu.

Gerakan perempuan itu muncul tahun 20an, sebagai suatu gerakan, ketika kita bersentuhan dengan wacana yang dibawa kolonialisme. Pada zaman Sukarno itu gerakan perempuan luar biasa majunya. Gerwani, misalnya.

HB:

Itu underbow-nya PKI, ya?

NDA:

Sebenarnya tidak bisa dikatakan underbow-nya PKI. Itu tuduhan belakangan. Sukarno sendiri punya *concern* yang kuat terhadap gerakan perempuan. Dia menulis Sarinah. Dan dia mengkritik perempuan Islam yang suka dipisah di masjid. Agus Salim juga sudah mengkritik soal hijab.

Ketika Orba berkuasa, gerakan perempuan itu menjadi diam, dan tidak muncul ke permukaan. Yang muncul adalah organisasi-organisasi sayap, seperti Dharmawanita, Muslimat NU, dsb.

Gerakan ini muncul kembali pada 1980-an, di Jogja. Kemudian di Jakarta, oleh kawan-kawan Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, dengan berbagai isu yang mereka angkat.

Sekarang, pasca-Orba, terutama sejak Gus Dur itu banyak kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Meskipun sampai sekarang implementasinya masih jauh. Waktu zaman Habibie, ini dijadikan Komnas Perempuan.

HB:

Komnas itu lembaga negara ya. Anda misalnya menjadi anggota Komnas itu melalui fit and proper test.

NDA:

Ya, tentu. Bukan hanya itu. Juga ada uji publik dan dialog publik yang disaksikan oleh para stake-holder Komnas Perempuan se Indonesia.

HB:

Siapa para stake-holder itu.

NDA:

Mulai dari NGO, departemen-departemen pemerintah dan ormas-ormas perempuan.

HB:

Kalau anda berbicara soal budaya dan sebagainya, juga di awal tadi anda berbicara soal penindasan kultural dan struktural, nah kalau persoalannya dari agama itu solusinya apa.

NDA:

Kalau dari agama, saya sebagai Muslim, yang paling pertama adalah membaca Alquran dengan kacamata baru. Bagaimanapun teks-teks itu kan tidak dari ruang hampa. Sekarang teks-teks itu harus dibaca lagi dengan kacamata yang tidak lagi maskulin. Rasa keadilan perempuan itu juga harus dikedepankan.

Jadi pertama menurut saya harus melihat kitab suci dengan tafsir baru. Harus melihat perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Allah.

HB:

Anda optimis strategi itu akan berjalan? Resistensinya pasti tinggi sekali.

NDA:

Resistensi kan biasanya karena ada yang merasa terancam. Kalau tidak terancam, biasanya mendukung.

HB:

Anda ingin berkata bahwa laki-laki ini terancam.

NDA:

Begini, ya, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau perempuan itu setara dengan laki-laki bukan berarti mereka akan berkuasa atas laki-laki. Kalau ini yang terjadi, maka akan ada hubungan dominasi baru. Ini yang saya coba minimalisir. Kita ini power sharing, setara. Di mana pun, kalau powernya tidak seimbang, ketidakadilan bisa terjadi.

HB:

Tadi agama. Kalau sumber masalahnya adalah politik bagaimana.

NDA:

Kalau dimensi politik, selama ini perempuan belum banyak diajak bicara. Suara perempuan belum terdengar cukup vokal. Sekarang ini kecenderungannya di wilayah politik itu perempuan masih dimobilisasi.

Mereka belum menjadi subyek yang utuh dan aktif. Dia memilih siapa, dia menginginkan apa untuk negeri ini, itu belum terjadi.

HB:

Tentang Komnas Perempuan. Apakah anda merasa puas dengan apa yang sudah dicapai Komnas Perempuan? Dan bagaimana prospeknya ke depan.

NDA:

Belum puas. Komnas masih punya agenda yang cukup panjang untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Tugas saya secara pribadi sebagai orang yang dipercaya adalah meminimalisir kekerasan atas nama budaya dan agama. Sekarang terutama adalah Perda-perda yang menindas perempuan.

Saya ingin memberi contoh tentang Perda ini. Di Aceh, yang banyak dicambuk, dikhalwat, itu yang sering di-*blow up* adalah perempuan. Ini adalah korban tafsir kelompok tertentu atas agama.

HB:

Selalu perempuan yang menjadi korban pertama dari syariah dan sebagainya itu. sayang sekali waktunya habis, Neng. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.